

# **TULUDE: ANTARA MODERNITAS DAN TRADISI MASYARAKAT PULAU MARORE**

## **TULUDE: MODERNITY AND THE TRADITION OF PEOPLE IN MARORE ISLAND**

Esty Ekawati

Pusat Penelitian Politik - LIPI

esty1wati@gmail.com

### **Abstrak**

Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan wilayah yang rentan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Perlu perlakuan khusus bagi wilayah tersebut terutama yang berbatasan dengan negara lain. Pulau Marore menjadi salah satu Pulau kecil terluar di sisi Utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebagai pintu gerbang aktivitas tradisional dan internasional, Pulau Marore tak luput dari terpaan arus globalisasi. Tulisan ini mengkaji mengenai ketahanan budaya masyarakat perbatasan di Pulau Marore di era globalisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara dengan masyarakat Marore. Temuan lapangan menunjukkan meskipun masyarakat Marore memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, sosial-ekonomi maupun sumber daya manusia namun, ketahanan budaya masyarakat Marore tetap terjaga melalui suatu tradisi leluhur yang hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat Sangir yakni tradisi Tulude.

**Kata kunci:** Pulau Marore, perbatasan, ketahanan budaya, Tulude

### **Abstract**

*The outermost small islands in Indonesia face an internal or external obstacles and challenges. Special treatment is needed for the islands bordering with other country. Marore Island became one of the outermost small island in the North side of Indonesia, which is directly adjacent to the Philippines. As the gates of traditional and international activities, Marore Island did not escape the onslaught of globalization. This article examines the social and cultural resilience in the border of Marore Island, seen from the ability of people facing barriers/challenges internally and externally. Data was conducted with field observation and in-depth interviews. The result show that despite Marore society has limitations in infrastructure, socio-economic, and human resources, Marore's cultural resilience is maintained through an ancestral tradition which is still firmly held by the Sangir community, namely "Tulude" tradition.*

**Keywords:** Marore Island, boundary, cultural resilience, Tulude

### **Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari 16.056 pulau. Pulau-pulau tersebut telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names* (UNCSSGN) dan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN) (<http://www.big.go.id/berita-surta/show/indonesia-daftarkan-16-056-pulau-bernama-dan-berkoordinat-ke-pbb>). Dari sekian banyak pulau tersebut, terdapat 92 pulau yang tergolong dalam kategori pulau-pulau kecil terdepan di Indonesia yang tersebar di 19 provinsi mulai dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua (<http://www.big.go.id/urgensi-pulau-pulau->

terluar-indonesia). Pulau-pulau tersebut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).

Jika dilihat secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir sama, yakni memiliki keterbatasan akses dengan wilayah daratan dan keterbatasan sarana dan prasarana serta belum tertatanya pemanfaatan ruang laut. Demikian juga dengan potensi alam yang dimiliki oleh kawasan perbatasan, baik itu potensi hutan, tambang, mineral, kelautan, dan perikanan. Di antara potensi-potensi tersebut, masih terdapat kawasan perbatasan yang belum

dikelola secara optimal. Pulau Marore merupakan salah satunya.

Pulau Marore merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore, selain dua pulau lainnya, yakni Pulau Kawio dan Pulau Matutuang. Sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, Pulau Marore menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri) Pemerintah Indonesia,<sup>1</sup> baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pengembangan potensi Pulau Marore masih belum optimal. Padahal Pulau Marore memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Keterbatasan yang dihadapi oleh Pulau Marore tersebut menjadikan ketahanan sosial masyarakatnya rentan.

Artikel ini akan menguraikan terlebih dahulu mengenai kondisi di Pulau Marore terkait kerentanan yang berdampak terhadap ketahanan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai ketahanan budaya sebagai persoalan lain yang juga menjadi penting untuk diperhatikan. Mengapa ketahanan budaya penting untuk diperhatikan? Karena arus globalisasi dan modernisasi telah menciptakan perubahan, baik karakter budaya maupun perilaku masyarakatnya. Bahkan, budaya tertentu terasa menjadi semakin samar dan tergantikan dengan budaya global dan modern yang bersifat umum.

Salah satu contoh dari berkembangnya budaya global dan modern tersebut misalnya yang terjadi di Bali, daerah yang mengalami perkembangan pesat di bidang pariwisata. Bali merupakan salah satu wilayah yang mengalami gempuran globalisasi sejak era kolonial hingga kini. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan perekonomian Bali melalui sektor pariwisata yang terus berkembang. Dampak positifnya, perekonomian Bali mengalami peningkatan. Namun, dampak negatifnya juga tak kalah pelik, yakni terjadi perubahan perilaku masyarakatnya. Perubahan tersebut dapat terlihat dari perubahan mata pencaharian, relasi sosial, dan perubahan

---

<sup>1</sup>Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) yang ditetapkan dalam Peraturan BNPP No. 1 tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Lihat: Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

dalam berbusana adat Bali yang merupakan tradisi (Ekawati, 2016).

Persoalan ketahanan budaya juga perlu mendapat perhatian, tidak hanya di wilayah-wilayah yang nyata-nyata terdampak oleh globalisasi, tetapi juga wilayah yang menjadi beranda luar NKRI. Wilayah tersebut dikenal dengan sebutan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) dan salah satunya adalah Pulau Marore di Sulawesi Utara. Poin yang menjadi pertanyaan permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimana upaya masyarakat Pulau Marore dalam menjaga ketahanan budaya di tengah gempuran modernisasi melalui tradisi *Tulude*?

### **Konsep Ketahanan Sosial**

Ketahanan dapat didefinisikan dalam banyak cara. Pada dasarnya, ketahanan adalah kemampuan suatu sistem untuk dapat bertahan dari gangguan. Konsep ketahanan sosial mengacu pada kemampuan individu, organisasi, dan komunitas dalam menerima, menyesuaikan, dan menanggulangi ancaman lingkungan dan sosial yang beragam. Ancaman tersebut bisa dari eksternal yang mengacu pada unit sosial, dinamika internal atau interaksi antara keduanya (Keck & Sakdapolrak, 2013: 8). Ketahanan sosial menurut definisi Adger adalah kemampuan masyarakat untuk dapat menahan atau melindungi diri dari gangguan eksternal terhadap infrastruktur sosial mereka (Adger, 2000: 9). Masyarakat memiliki suatu kemampuan untuk dapat mengantisipasi risiko, membatasi dampak, dan dapat bangkit kembali dengan cepat dalam menghadapi suatu perubahan melalui berbagai cara agar tetap dapat bertahan hidup (*survival*), memiliki kemampuan beradaptasi, berevolusi, dan mengalami pertumbuhan (*A CARRI Report*, 2013). Dalam konteks ini, ketahanan sosial dilihat berdasarkan kondisi alam, fisik/ infrastruktur, sosial, dan ekonomi di Pulau Marore. Selain itu, tantangan yang sifatnya eksternal dapat dilihat dari relasi yang terjadi antara masyarakat Marore dengan Filipina Selatan sebagai wilayah yang secara geografis dekat dengan Pulau Marore.

### **Konsep Ketahanan Budaya**

Ketahanan budaya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan negara. Melalui cara-cara tertentu, masyarakat mencoba mempertahankan tradisi/ adat sebagai bagian dari bangunan budaya dalam menghadapi

globalisasi. Hal ini disebabkan arus globalisasi telah membawa dampak/pengaruh bagi masyarakat yang mengalaminya. Dampak globalisasi bisa positif ataupun negatif tergantung bagaimana masyarakat merespons dan mengelolanya. Sebagai contoh, Bali merupakan salah satu wilayah yang mengalami gempuran globalisasi sejak era kolonial hingga kini. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan perekonomian Bali melalui sektor pariwisata yang terus berkembang. Dampak positifnya, tentu tingkat perekonomian Bali cukup tinggi. Namun, dampak negatif yang juga tak bisa dielakkan adalah perubahan perilaku masyarakat Bali, baik dalam aspek mata pencaharian, relasi sosial, maupun perubahan dalam berbusana adat Bali. Untuk meminimalisasi ancaman globalisasi tersebut, Bali mencoba untuk membentengi dirinya melalui peng-ajek-an adat istiadat Bali yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas dengan mengusung wacana Ajeg Bali (Ekawati, 2016: 381).

Budaya menurut C.A Van Peursen adalah manifestasi kehidupan setiap orang dan sekelompok orang, yang meliputi segala perbuatan manusia, seperti cara menghayati kematian, cara mengolah makanan, cara bersopan santun waktu makan, cara membuat alat-alat berburu, tradisi (pewarisan norma-norma, adat istiadat, harta benda), kesenian, ilmu pengetahuan, dan sebagainya (Retnowati, 2007: 2). Adapun ketahanan budaya adalah ketahanan akan nilai-nilai, norma-norma, tradisi, yang terwujud dalam perilaku dan kehidupan sebagaimana yang tercakup dalam definisi budaya (Retnowati, 2007: 2). Ketahanan budaya menekankan pada upaya mengembangkan identitas budaya, pengetahuan kritis, dan pengetahuan praktis dalam mengatasi kesulitan seperti dalam definisi C.S. Clauss-Ehlers bahwa "*Cultural resilience refers to a culture's capacity to maintain and develop cultural identity and critical cultural knowledge and practices; it considers how cultural background (including customs and traditions) helps individuals and communities overcome adversity*" (Smyntyna, 2016: 5).

Selain masyarakat, negara juga harus hadir dalam menjaga ketahanan budaya, terutama di pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara lain. Upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga tradisi dan budaya tetap lestari/tidak pudar. Karena jika tidak dijaga, bukan tidak mungkin tradisi atau budaya masyarakat pinggirannya tersebut akan pudar oleh

globalisasi dan diklaim oleh negara lain yang secara geografis lebih dekat dengan pulau-pulau terluar.

### **Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau Marore**

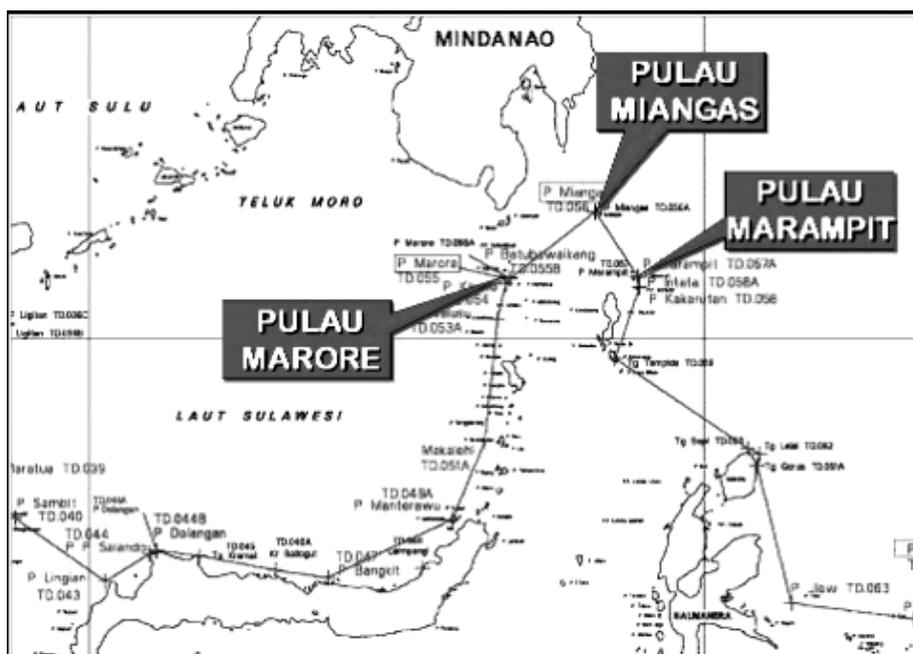
Pulau Marore merupakan bagian dari Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Salah satu ciri khas dari kecamatan Kepulauan Marore adalah semua wilayah pemerintahan terdiri dari berbagai pulau. Namun, secara administrasi hanya terdiri dari 3 desa/kampung, tetapi 3 desa/kampung tersebut tersebar di 10 pulau yang dibagi dua berdasarkan penghuni/penduduk, yaitu: (1) Pulau berpenghuni terdiri dari Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kamboleng, dan Pulau Matutuang, serta (2) Pulau tidak berpenghuni yang terdiri dari Pulau Mamanuk, Pulau Ehise, Pulau Dumarehe, Pulau Banuawuhu, Pulau Batupebaekang, dan Pulau Dokole.

Dari aspek etnis, komposisi penduduk terdiri dari tiga etnik besar, yaitu sub-etnik Siau Tagulandang, sub-etnik Talaud, dan sub-etnik Sangihe Besar. Bahasa sehari-hari adalah Bahasa Sangihe Talaud, sedangkan Bahasa Indonesia digunakan dalam forum resmi dan pengajaran di sekolah.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Pulau Marore merupakan pulau terluar yang paling dekat dengan Filipina (Pulau Balut dan Pulau Sarangani). Dalam kondisi cuaca teduh, masyarakat Pulau Marore hanya memerlukan waktu sekitar 3 jam untuk bisa sampai ke Filipina dengan menggunakan perahu motor (*pumpboat*). Bandingkan dengan akses ke Tahuna -- Ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe -- yang memerlukan waktu tempuh 10-13 jam menggunakan kapal perintis atau kapal feri yang disediakan oleh pemerintah khusus untuk warga perbatasan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.

Pulau Marore memiliki luas sekitar 2,6 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Pulau Marore mencapai 692 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan adalah 334 jiwa dan laki-laki 358 (Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015). Wilayah ini memiliki iklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di antara kedua musim tersebut, terdapat musim pancaroba yang biasanya terjadi tiupan angin

Gambar 1.  
Peta Pulau Marore



Sumber: [https://www.google.co.id/search?q=peta+pulau+marore&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DDx5n1QY44XDPM%253A%252CrQmjg7f4p8fnM%252C\\_&usg=\\_\\_KaTKDjo1g4fKakuql\\_Wh1Oo5fMY%3D&sa=X&ved=0ahUKewiouaGWt4jYAhXCNo8KHfEDlwQ9QEILjAC#imgcr=DDx5n1QY44XDPM](https://www.google.co.id/search?q=peta+pulau+marore&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DDx5n1QY44XDPM%253A%252CrQmjg7f4p8fnM%252C_&usg=__KaTKDjo1g4fKakuql_Wh1Oo5fMY%3D&sa=X&ved=0ahUKewiouaGWt4jYAhXCNo8KHfEDlwQ9QEILjAC#imgcr=DDx5n1QY44XDPM), diakses pada 14 Desember 2017.

yang sangat kencang yang dikenal dengan angin barat dan biasanya terjadi mulai bulan Desember sampai bulan Februari. Sementara itu, musim yang tidak berangin atau laut teduh terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Juni.

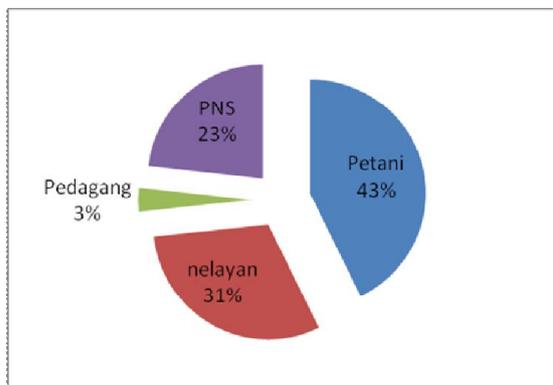
Sebagai wilayah kepulauan dan tanah berpasir, masyarakat Marore memiliki persoalan dalam mengakses air bersih. Untuk ketersediaan air bersih, dulunya masyarakat Marore mengandalkan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan. Akan tetapi, sejak adanya bantuan sumur bor dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka kebutuhan air bersih untuk masyarakat Marore saat ini sudah terpenuhi. Bantuan sumur bor ini diberikan bagi setiap rumah di Marore (<http://manado.antarane.ws.com/berita/30199/kebutuhan-air-minum-di-marore-terpenuhi>). Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan program desalinasi air laut menjadi air minum. Akan tetapi, program tersebut sampai kini belum berjalan karena masyarakat Marore masih ragu terhadap kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut.

Meski termasuk pulau terluar, Marore memiliki infrastruktur yang terbilang cukup baik. Adanya dermaga sandar bagi kapal PELNI dan feri telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Marore yang ingin mengunjungi keluarga di pulau-pulau lainnya, terutama kunjungan ke Ibukota Kabupaten, Tahuna. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan terbilang sudah memadai dalam menghubungkan antar dusun di pulau tersebut. Meski Pulau Marore merupakan pulau kecil, tetapi akses listrik 24 jam sudah terpenuhi. Sejak tahun 2013, listrik di Pulau Marore sudah beroperasi 24 jam. Pasokan listrik di Marore berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN. Dengan beroperasinya listrik selama 24 jam, maka hal itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama nelayan dan pengepul ikan, untuk mengawetkan ikan dengan menggunakan es batu. Keberadaan *freezer* dan es sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama pada saat musim panen ikan.

Meskipun Pulau Marore merupakan wilayah kepulauan, tetapi hanya sekitar 31%

penduduk Marore yang menjadi nelayan—justru 43% penduduk Marore adalah petani. Selain petani dan nelayan, ada juga penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut.

**Gambar 2**  
Mata Pencaharian Penduduk Pulau Marore



Sumber: Kepulauan Marore Dalam Angka 2015 (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2015: 26)

Pertanian atau perkebunan menjadi alternatif mata pencaharian penduduk Pulau Marore selain melaut. Kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Marore berpengaruh terhadap pola/aktivitas melaut nelayan. Musim teduh biasanya menjadi musim panen ikan nelayan Marore. Namun, sayangnya musim ini hanya berlangsung sekitar 3-4 bulan. Ketika musim angin barat, nelayan Marore tidak dapat melaut karena gelombang besar, air laut pasang, dan angin kencang. Saat di Marore, penulis pernah merasakan kondisi tersebut. Meski demikian, ada masa-masa ketika cuaca berangin tapi bukan angin barat, sehingga nelayan Marore masih bisa melaut meskipun jarak tempuhnya tidak jauh dari bibir pantai.

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berguna dalam pembangunan wilayah. Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Pulau Marore yaitu satu Sekolah Dasar (SD), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketersediaan sarana pendidikan hingga tingkat SMA telah membuka kesempatan bagi anak-anak di Pulau Marore dan pulau sekitarnya untuk dapat mengakses pendidikan minimal 12 tahun. Bagi penduduk Marore yang tingkat perekonomiannya baik, melanjutkan kuliah di

Tahuna atau Manado adalah pilihan bagi orang tua demi memperbaiki kehidupan anak-anaknya.

Untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga perbatasan, di Pulau Marore terdapat Puskesmas yang dilengkapi dengan instalasi rawat inap yang letaknya berseberangan dengan Puskesmas. Ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Pulau Marore terbilang kurang memadai. Tidak adanya dokter di Puskesmas sejak beberapa bulan menjadikan pelayanan kesehatan hanya ditangani oleh tenaga kesehatan lainnya dan dibantu oleh tenaga kesehatan dari Gerakan Nusantara Sehat (program dari Kementerian Kesehatan RI). Sebagai daerah terpencil perbatasan yang bergantung dengan cuaca menjadikan Puskesmas Pulau Marore kerap mengalami kesulitan ketika harus mengambil obat-obatan di kabupaten. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas kesehatan Puskesmas Marore “kesulitan *supply* obat ada di awal tahun karena kapal tidak bisa melaut akibat cuaca buruk” (wawancara dengan petugas kesehatan Marore).

Potensi perikanan yang besar menjadi modal alam yang bernilai bagi masyarakat Marore. Hanya saja pengelolaannya belum maksimal. Meskipun masyarakat Pulau Marore banyak yang menjadi nelayan, tetapi karena sulitnya pasar penjualan ikan maka perekonomian nelayan di Marore belum menunjukkan peningkatan. Keterbatasan sarana dan mahalnya biaya operasional menuju Ibukota Kabupaten menyebabkan nelayan Marore hanya bisa menjual hasil tangkapan ikan ke pengepul lokal berskala kecil yang ada di Pulau tersebut dan selebihnya untuk konsumsi sehari-hari. Hasil tangkapan nelayan terdiri dari beberapa jenis ikan, misalnya ikan *geropa* (kerapu), ikan layang, ikan tongkol, ikan cucut, ikan bobara, ikan onthoni, ikan kembung dan jenis ikan karang lainnya. Dari jenis-jenis ikan tersebut, hanya ikan bobara yang memiliki nilai jual mencapai Rp.35.000/kg, sedangkan yang lainnya hanya berkisar di harga Rp.10.000 – 20.000/kg (*Kepulauan Marore Dalam Angka 2015*, 2015: 80). Bahkan, sebagian dari nelayan di Marore memilih fokus pada penangkapan ikan gurango (ikan hiu) karena harga jual sirip ikan gurango kering kualitas nomor satu harganya Rp.1.000.000,- di Marore dan mencapai Rp.2.000.000,- di Manado.

Selain potensi perikanan, Pulau Marore memiliki lahan pertanian yang bisa digarap oleh

masyarakat. Meskipun kontur tanah di sana berbatu/kerikil dan berbukit, tetapi masih banyak terdapat sumber mata air sehingga memungkinkan jenis tanaman tertentu bisa tumbuh, seperti kelapa, umbi-umbian, pohon mangga, nanas, dan pepaya. Pada tahun 2014, lahan seluas 1,4 hektar mampu menghasilkan 56 ton singkong dan dari 2 hektar lahan menghasilkan 9 ton ubi jalar. Selaian umbi-umbian, Pulau Marore juga menghasilkan buah pepaya dengan angka produktivitasnya mencapai 900 ton pada tahun 2014 (*Kepulauan Marore Dalam Angka 2015*, 2015: 64-66). Sayangnya, hasil tanaman ini kemudian hanya diperjual-belikan dan dikonsumsi sendiri oleh masyarakat di Pulau Marore dan pulau-pulau di sekitarnya karena keterbatasan akses transportasi dan pasar. Oleh karena itu, hasil pertanian masyarakat di Pulau Marore belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani di sana. Masih minimnya penghasilan, baik itu nelayan maupun petani, dapat dilihat dari jumlah keluarga pra-sejahtera di Pulau Marore, yakni dari 188 KK terdapat 65 KK masuk kategori keluarga pra-sejahtera (Data Kantor Kecamatan Kepulauan Marore, 2016).

Kondisi perekonomian masyarakat Marore terbilang masih minim. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Kepulauan Marore hanya sebesar Rp.1.042.500, yang bersumber dari pajak reklame dan Rp.3.365.749,- dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (*Kepulauan Marore Dalam Angka 2015*, 2015: 108-109). Keterbatasan sarana transportasi yang menghubungkan Marore dengan Tahuna menjadikan perekonomian Marore masih terbatas. Harga sembako di Pulau Marore lebih tinggi dari harga pasar. Sulitnya mengakses bahan pokok makanan disebabkan pusat perdagangan ada di Tahuna. Sementara itu, sarana transportasi dari dan menuju Tahuna sangat terbatas kedatangannya. Kapal perintis menjadi moda transportasi yang digunakan untuk aktivitas masyarakat di sekitar Kepulauan Sangihe dan Talaud. Persoalannya, kapal perintis tersebut tidak memiliki jadwal pasti keberangkatan dan kedatangannya. Kondisi tersebut bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan bahan bakar minyak di pangkalan Tahuna.

Selain tantangan yang sifatnya internal seperti yang diuraikan di atas, masyarakat Pulau Marore juga menghadapi tantangan yang sifatnya eksternal. Kedekatan hubungan antara penduduk di Marore dan di Balut dan Sarangani (Filipina Selatan) menjadikan garis batas negara

menjadi samar, bahkan dijadikan alasan untuk membenarkan aktivitas pencarian ikan di luar wilayah teritorinya. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya nelayan Filipina yang mencari ikan sampai ke perairan kepulauan Marore dan sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh petugas keamanan laut di Marore, "*Pernah ada laporan dari sekretaris desa bahwa di Pulau Mamanuk adalah tempat memancing nelayan kita. Namun, sekarang justru banyak nelayan Filipina yang memancing di sana. Nelayan Marore takut karena nelayan Filipina membawa senjata*" (wawancara dengan petugas keamanan di Pulau Marore). Pencurian ikan di wilayah perairan Marore, Kabupaten Sangihe oleh nelayan asing menjadi salah satu penyebab kerentanan ekonomi masyarakat di sana. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Marore selayaknya dikelola secara optimal demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Jika melihat deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa ketahanan sosial masyarakat Pulau Marore cenderung rentan. Hal ini disebabkan keterbatasan maupun tantangan yang mesti dihadapi oleh masyarakat Pulau Marore.

#### **Tradisi *Tulude* sebagai Bentuk Ketahanan Budaya Masyarakat Marore**

Kawasan perbatasan tentu tidak bisa selalu dikatakan terbelakang akibat keterbatasan aksesnya ke ibukota. Kemajuan informasi dan telekomunikasi sebagai dampak dari globalisasi menjadikan kawasan pulau kecil terluar pun dapat menjangkau perkembangan dunia. Globalisasi yang dianggap sebagai suatu bentuk modernitas yang dibawa oleh negara Barat ke Timur masih menyimpan beragam perdebatan. Hans-Henrik Holm dan Georg Sorensen mendefinisikan globalisasi sebagai "*...the intensification of economic, political, social and cultural relations across borders* (Al-Rodhan, 2006: 10).

Adapun modernitas menurut Giddens mengacu pada model kehidupan sosial atau organisasi yang muncul di Eropa setelah abad 17 yang kemudian dampaknya menjadi sangat berpengaruh di belahan dunia (Giddens, 1990: 1). Selanjutnya, modernitas berdampak pada terjadinya pertemuan antara budaya impor (eksternal) yang unsur-unsurnya lebih maju dan berwatak kapitalis dengan budaya lokal (internal) yang berwatak tradisional. Pertemuan kedua budaya

tersebut pada umumnya berdampak pada tereliminasi unsur lokal dari tatanan kehidupan masyarakat. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu (<http://www.seputarsulut.com/Tulude-manifestasi-daerah-yang-berkepribadian-budaya/>).

Posisi Pulau Marore yang berada di ujung utara Kepulauan Indonesia nyatanya sudah menikmati kemajuan informasi dan telekomunikasi. Dengan adanya akses listrik 24 jam, adanya siaran /program televisi lokal maupun nasional, dan akses internet melalui jaringan *wifi* dari Pos AL dan internet gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika maka sebagian masyarakat Marore sudah mengetahui perkembangan sosial, ekonomi, dan politik Negara Republik Indonesia dan negara-negara lainnya. Selain itu, sebagian pegawai pemerintah kecamatan ataupun desa di Pulau Marore berasal dari Tahuna yang notabene lebih maju.

Tak dapat dipungkiri bahwa penduduk di Indonesia sebagian besar adalah masyarakat adat yang tersebar di berbagai provinsi dan setiap masyarakat adat tersebut mempunyai ciri khas kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya masing-masing. Meskipun globalisasi selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab lunturnya budaya lokal/adat/tradisi di sebagian wilayah Indonesia, tetapi masyarakat Pulau Marore ternyata masih mempertahankan tradisi Sangir (sebutan untuk masyarakat yang berasal/keturuan dari Kepulauan Sangihe). Tradisi dan budaya masih terasa kental menyelubungi kehidupan masyarakat Sangir di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi terhadap kebudayaan nasional. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang masyarakat Sangir masih terjaga. Salah satu acara tradisi yang masih dilestarikan adalah *Upacara Adat Tulude* yang digelar setiap awal pergantian tahun oleh masyarakat keturunan Sangir termasuk di Pulau Marore.

Kata “Marore” sendiri berasal dari kata *tamalale/tamarale* (bahasa Sangihe) yang berarti “tidak mengenal lelah”, sebuah nama yang menyiratkan sikap hidup masyarakatnya. Penduduk Marore adalah orang-orang suku Sangihe yang telah lama tinggal di pulau tersebut. Seorang tokoh pejuang Sangihe bernama Barhama dianggap sebagai pemimpin pertama orang Sangihe yang bermukim di Marore. Masyarakat Marore melaksanakan

upacara adat *Tulude* selain sebagai ungkapan syukur juga sebagai peringatan terbentuknya pemukiman Marore yang dilaksanakan setiap 31 Januari (Soeratin, 2011: 216).

Upacara adat *Tulude* merupakan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara (Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara. Telah berabad-abad acara sakral dan religi ini dilakukan oleh masyarakat etnis Sangihe dan Talaud sehingga tidak bisa dilupakan oleh generasi di sana hingga kini. Tradisi ini telah terpatri dalam khasanah adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nusa Utara. Bahkan, tradisi budaya ini secara perlahan dan pasti mulai diterima bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara, dalam hal ini Sangihe, Talaud, dan Sitaro, tetapi telah diterima sebagai suatu tradisi budaya masyarakat Sulawesi Utara. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa adanya komunitas masyarakat etnis Sangihe-Talaud, maka di sana akan ada pula hajatan *Tulude* (<http://budaya-indonesia.org/Upacara-Adat-Tulude>).

Kata *Tulude* atau *menulude* berasal dari kata *suhude* yang dalam bahasa Sangir berarti “tolak”. Secara luas, *Tulude* berarti menolak untuk terus bergantung pada masa lalu dan bersiap menyongsong tahun depan. *Tulude* diselenggarakan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah yang telah diberikan Tuhan selama satu tahun berlalu. *Tulude* tidak hanya digelar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi juga di Kabupaten lain di Sulawesi Utara tempat Suku Sangir berada, seperti di Bitung, Manado, Gorontalo, dan daerah lainnya (<https://indonesia.mengajar.org/cerita-pm/umi-qodarsasi-2/upacara-adat-Tulude-kearifan-lokal-suku-sangir>).

Upacara adat *Tulude* merupakan wujud ungkapan syukur orang Sangir karena telah diberkati oleh Sang Pencipta atau dikenal *Mawu Ruata Ghenggona Langi* (Tuhan Yang Mahakuasa) ketika memasuki tahun yang baru. Secara historis, upacara adat *Tulude* yang pertama dilaksanakan di Manuwu (Salurang) Kecamatan Tabukan Selatan dalam masa pemerintahan "Kulano Manentonau" pada permulaan abad ke-16. Upacara *Tulude* menghimpun segenap masyarakat untuk berperan dengan membawa makanan. Oleh karena itu, upacara *Tulude* ini juga dijuluki “Saliwangu Banua” yang berarti pesta rakyat makan bersama

([http://www.academia.edu/9145093/Transignifikasi\\_Kue\\_Tamo\\_dalam\\_Upacara\\_Tulude](http://www.academia.edu/9145093/Transignifikasi_Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude)).

Tradisi *tulude* sendiri dalam perkembangannya mengalami perubahan tatkala masa kolonial berlangsung. Awalnya, upacara adat *Tulude* dilaksanakan oleh para leluhur pada setiap tanggal 31 Desember sebagai penghujung akhir tahun. Pengertian *Tulude* itu sendiri adalah melepaskan, meluncurkan, menolak, atau mendorong, dalam hal ini melepaskan tahun yang lama dan siap menerima tahun yang baru. Dalam tradisi leluhur masyarakat Sangihe dan Talaud, acara tolak tahun ini diwujudkan dengan upacara di tepi pantai dengan melepaskan, meluncurkan, atau mendorong sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu *latolang* (sejenis kayu yang tumbuh lurus tinggi tak bercabang) dengan muatan tertentu. Perahu ini oleh tokoh adat didorong, dilepas, atau dihanyutkan ke laut sebagai simbol, segala sesuatu yang buruk di tahun yang akan lewat dibuang atau dihanyutkan ke laut agar tidak lagi menimpa warga desa setempat di tahun yang baru (<http://budaya-indonesia.org/Upacara-Adat-Tulude>).

Ketika agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah Sangihe dan Talaud pada abad ke-19, upacara adat *Tulude* ini telah diisi dengan muatan-muatan ritual agama samawi berupa penginjilan. Kemudian, atas dasar kesepakatan adat, maka perayaan *tulude* dialihkan ke tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Hal ini dilakukan karena umat Kristen di Sangihe dan Talaud sebelumnya telah disibukkan dengan acara ibadah malam Natal dan tahun baru (<http://budaya-indonesia.org/Upacara-Adat-Tulude>). Akhirnya pada tahun 1995 melalui temu budaya yang disponsori tokoh adat etnis Sangihe dan juga atas kesepakatan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sangihe-Talaud disepakati bahwa tanggal 31 Januari merupakan hari besar/pesta rakyat dalam rangka perayaan *Tulude*.

Selain karena alasan teknis keagamaan, perayaan *Tulude* yang dilaksanakan pada 31 Januari juga didasarkan pada alasan bahwa Kata "*Tulude*" sendiri mengacu pada posisi bintang fajar (*Kadademahe*) yang tegak lurus 90° yang diyakini terjadi tepat pada pukul 00.00 tanggal 31 Januari setiap tahun, atau nama bulan keempat di langit menurut perhitungan ilmu astronomi etnis Sangihe. Bulan keempat, yaitu *Tulude*, menurut dialek masyarakat *Tagulandang* disebut "Tuluri", sedangkan menurut dialek masyarakat Talaud disebut "Lattu" ([\[academia.edu/9145093/Transignifikasi\\\_Kue\\\_Tamo\\\_dalam\\\_Upacara\\\_Tulude\]\(http://www.academia.edu/9145093/Transignifikasi\_Kue\_Tamo\_dalam\_Upacara\_Tulude\)\).](http://www.</a></p></div><div data-bbox=)

Salah satu ciri khas upacara *Tulude* adalah kue tamo. Kue Tamo adalah makanan yang terbuat dari beras ketan dicampur dengan gula merah dan santan lalu dibentuk kerucut seperti nasi tumpeng. Pembuatan kue Tamo tidak bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi harus di kediaman seorang Mayore Labo, pemimpin adat, yang nantinya berhak memotong kue tersebut. Kue Tamo memiliki makna yang mendalam. *Pertama*, sebagai bentuk pernyataan syukur atas perlindungan Tuhan Semesta Alam pada tahun yang sudah berlalu. *Kedua*, permohonan berkat dan kesuksesan untuk tahun baru yang sedang dijalani. *Ketiga*, permintaan agar dijauhkan dari penyakit, bencana, dan perselisihan dalam masyarakat.

*Tatuwang Tamo* adalah tahap puncak dari prosesi upacara *Tulude*. Tahapan *Tatuwang Tamo* diawali dengan *Sasalamate Tamo*, yakni rangkaian doa atau ungkapan hikmat atas kue Tamo yang akan dipotong dan dibagi-bagikan. Pemotongan kue oleh Mayore Labo harus dilakukan dengan khusuk dan doa-doa yang dipanjatkan menggunakan bahasa adat. Proses pembuatan dan arak-arakan kue tamo menuju pelataran upacara memiliki makna perjamuan yang menggambarkan kesederajatan semua orang tanpa melihat sekat-sekat sosial yang menghalangi. Adapun prosesi pemotongan dan pembagian kue Tamo yang dilakukan oleh tetua adat menggambarkan bentuk sakral atas nilai-nilai hidup seperti penghargaan atas kemanusiaan dan kebersamaan ([http://www.academia.edu/9145093/Transignifikasi\\_Kue\\_Tamo\\_dalam\\_Upacara\\_Tulude](http://www.academia.edu/9145093/Transignifikasi_Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude)).

Acara *Tulude* biasanya disertai dengan acara kesenian seperti tarian *Empat Wayer*, *Masamper*, dan *Cakalele*. Tarian *Masamper* dan *Empat Wayer* biasanya juga digelar dalam acara pernikahan dan hari ulang tahun, sedangkan tari *Cakalele* dilakukan saat menyambut tamu yang dihormati (<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/>). Tarian *Cakalele* juga merupakan tarian perang, penari membawa parang serta sapu tangan (*lenso*) yang melambangkan martabat penduduk yang harus dijaga. Meski tradisi *Tulude* dan tari-tarian tersebut adalah bukan tradisi asli Marore melainkan tradisi Sangir, tetapi upaya masyarakat Marore yang juga adalah keturunan Sangir dalam melestarikan tradisi tersebut patut diapresiasi. Upacara ini sangat bermakna di

tengah upaya mengoptimalkan kearifan lokal untuk menciptakan rasa kebersamaan. Dengan tetap mempertahankan tradisi tersebut maka masyarakat telah melakukan pewarisan nilai-nilai atau norma-norma tradisional. Upaya tersebut merupakan bentuk ketahanan budaya masyarakat Marore di tengah arus globalisasi dunia.

Upacara *Tulude* yang digelar oleh masyarakat Sangir yang khususnya hidup di Pulau Marore menunjukkan bahwa Indonesia begitu kaya akan budaya. Di beranda luar negeri ini, nyatanya kearifan lokal masih terus tumbuh dan lestari. Pergelaran upacara Adat *Tulude* ini menjadi salah satu identitas keberagaman budaya dan wadah pemersatu masyarakat di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Dalam melestarikan peninggalan warisan para leluhur dan sebagai penangkal arus modernisasi dalam menjaga khazanah kearifan lokal, budaya harus mengakar, dalam menghadapi arus globalisasi, serta memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, dan juga sebagai aset di bidang pariwisata (<http://www.seputarsulut.com/Tulude-manifestasi-daerah-yang-berkepribadian-budaya/>).

Terkait pelestarian tradisi seperti *Tulude* ini tidak bisa serta merta hanya menjadi tanggung jawab masyarakat yang merayakannya. Namun, lebih luas, negara perlu hadir menjaga kelestarian tradisi tersebut sebagai sebuah identitas budaya. Hal ini disebabkan secara geografis Pulau Marore lebih dekat dengan Filipina, bahkan sebagian penduduk di pulau Balut dan Sarangani (Filipina Selatan) merupakan keturunan Sangir. Jika tradisi tersebut tidak dijaga sebagai sebuah identitas bangsa, budaya *Tulude* bisa saja terkikis oleh modernisasi dan punah. Selain itu, secara politik, tradisi ini bisa diklaim sebagai tradisi negara lain, seperti yang pernah dilakukan oleh Malaysia ketika mengklaim bahwa reog ponorogo, batik, dan angklung berasal dari Malaysia.

Kearifan lokal masyarakat Pulau Marore tidak hanya dalam bentuk upacara *Tulude*. Selain itu, terdapat tradisi yang terkait kegiatan pertanian yang dikenal dengan istilah *Eha*. *Eha* adalah suatu aturan untuk panen kelapa hanya dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini merupakan suatu kebiasaan adat kampung untuk menjaga kualitas buah serta mengeliminasi pencurian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ([www.ppk-kp3k.kkp.go.id](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id)).

Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlangsung di masyarakat Pulau Marore juga beragam. Berdasarkan cerita dari salah satu narasumber di Pulau Marore, masyarakat di Marore masih memegang teguh toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Ikatan persaudaraan di Pulau Marore dapat dilihat ketika ada keluarga yang sedang berduka, maka masyarakat di Marore bergotong royong membantu keluarga yang berduka dengan mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Bantuan tersebut bisa berupa uang maupun bahan makanan. Perwakilan dari desa akan mengumpulkan sumbangan dengan mendatangi rumah-rumah di sekitar rumah keluarga yang berduka kemudian hasil sumbangan tersebut diantarkan kepada keluarga yang berduka. Tujuannya adalah mengurangi beban keluarga yang sedang berduka (Wawancara dengan guru SMA Marore).

Kegiatan gotong royong masyarakat Marore juga dapat dilihat ketika ada warga yang akan mengadakan syukuran atas pembangunan rumah tinggal. Masyarakat di Pulau Marore datang dengan membawa bahan makanan untuk dimasak bersama-sama. Selain itu, warga laki-laki secara sukarela bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mendapat bayaran. Kegiatan gotong royong tersebut juga berlaku saat ada prosesi pembangunan pusaran (kuburan) bagi warga yang meninggal.

Terkait dengan toleransi beragama, masyarakat di Pulau Marore masih sangat menghargai keragaman etnis dan agama. Meski penduduk Marore mayoritas beragama Kristen, tetapi ada beberapa penduduk pendatang Marore yang beragama Islam. Saat perayaan Idul Fitri, Ketua Jemaat Gereja dan rombongannya akan mengunjungi penduduk Muslim di Marore dengan membawa makanan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dan rasa persaudaraan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Marore. Hal lain yang juga dipegang teguh oleh masyarakat Marore dan pulau lain di sekitarnya, seperti Pulau Kawio, adalah hari Minggu merupakan hari ibadah sehingga setiap hari Minggu masyarakat tidak melakukan aktivitas melaut atau berdagang melainkan ibadah ke Gereja (Wawancara dengan guru SMA Marore).

Kebiasaan baik masyarakat Marore lainnya yang dirasakan sendiri oleh penulis yakni keramahan individu-individu di Marore. Dari anak kecil, dewasa, hingga kakek nenek akan saling bertegur sapa dalam setiap

kesempatan. Bahkan, ketika ada kunjungan atau tamu yang berasal dari daerah lain, masyarakat Marore akan menyambutnya dengan sangat ramah dan baik. Tidak adanya sifat individualis di dalam budaya masyarakat Marore menjadikan ikatan persaudaraan menjadi begitu hangat.

Pemeliharaan budaya atau tradisi seperti yang dilakukan masyarakat Marore di atas perlu dilakukan demi menjaga ketahanan budaya masyarakat setempat. Melalui kebijakan peningkatan ketahanan budaya diharapkan agar masyarakat dapat turut serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Hal ini akan mendorong terwujudnya sikap masyarakat yang saling menghargai, mengakui, dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya, sehingga dapat memperkokoh ikatan persaudaraan dan kebangsaan (*Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*, 2004: 48).

## Penutup

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki nilai strategis dalam hal penegakan kedaulatan wilayah negara. Persoalan yang melingkupi kawasan perbatasan selama ini yakni terjadinya kesenjangan antara kawasan perbatasan dengan wilayah lain di Indonesia. Keterpinggiran dan keterbatasan infrastruktur menjadikan kawasan perbatasan menghadapi kendala dalam pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.

Pulau Marore merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia yang berbatasan laut dengan Pulau Balut dan Saranggani, Republik Filipina. Sebagai pulau kecil terluar, maka keterbatasan akses masyarakat Marore ke ibukota kabupaten menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Marore. Justru interaksi, baik sosial maupun perdagangan, banyak dilakukan masyarakat Marore dengan masyarakat di Filipina yang secara jarak tentu lebih dekat. Meski memiliki sejumlah keterbatasan, baik dalam infrastruktur, sumber daya manusia, serta keterbatasan finansial, tetapi hal tersebut mampu dihadapi masyarakat Marore. Meski ketahanan sosial masyarakat Pulau Marore cenderung rentan, tetapi masyarakat Marore ternyata mampu melakukan pemertahanan budaya melalui pemeliharaan beragam tradisi. Karena globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh sebuah bangsa, maka yang bisa dilakukan adalah

menjadikan globalisasi sebagai sebuah tantangan untuk tetap menjaga warisan budaya bangsa agar tetap eksis dan memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia kepada dunia.

Di tengah gempuran globalisasi yang melanda Indonesia, masyarakat Marore sampai kini mampu mempertahankan tradisi yang lahir dari keturunan Sangir, yakni tradisi *Tulude* sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikan dan rahmat yang telah dilimpahkan. Selain itu, terdapat juga tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat Marore, yakni gotong-royong dalam membangun rumah, pembangunan pusaran (kuburan), membantu meringankan keluarga yang mengalami musibah (kematian), hingga toleransi antarumat beragama. Tradisi-tradisi tersebut penting untuk dijaga eksistensinya demi menghadapi gempuran globalisasi yang perlahan mulai mengikis kebudayaan Indonesia di wilayah lainnya. Perlu kehadiran masyarakat dan negara dalam menjaga tradisi-tradisi yang ada sebagai sebuah identitas budaya Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adger, W.N. (2000). "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347–64.  
doi:10.1191/030913200701540465.
- Al-Rodhan, Nayef R.F. (2006). *Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition*. Geneva Centre for Security Policy.
- BPS. (2015). "Kepulauan Marore Dalam Angka 2015." Kabupaten Kepulauan Sangihe: BPS.
- BPS. (2015). "Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2015". Kabupaten Kepulauan Sangihe: BPS.
- Community & Regional Resilience Institute, (2013). *Definitions of Community Resilience: An Analysis*, (A CARRI Report). CARRI dan Meridian Institute.
- Ekawati, Esty. (2016). "Peran Globalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Bali: dalam Tinjauan Ekonomi, Politik dan Adat Bali" dalam Muhammad Hisyam dan Cahyo Pamungkas (eds), *Indonesia*,

- Globalisasi dan Global Village*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Giddens, Anthony. (1990). *The Consequencies of Modernity*. UK: Polity Press.
- Jori Darondo, (2016). “Kebutuhan Air Minum di Marore Terpenuhi”. 2 Juni. <http://manado.antaranews.com/berita/30199/kebutuhan-air-minum-di-marore-terpenuhi>. Diakses pada 22 Juli 2016.
- Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
- Keck, Markus, and Patrick Sakdapolrak. (2014). “What Is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward.” *Erdkunde* 67, no. 1 (2013): 5–19. doi: 10.3112/erdkunde.2013.01.02.
- Kristianto, Adi Budi. “Transnifikansi (Perubahan Makna) Kue Tamo dalam Upacara *Tulude*: Suatu Upaya Inkulturasi Liturgi Atas Budaya Sangir,” n.d. [http://www.academia.edu/9145093/Transnifikansi\\_Kue\\_Tamo\\_dalam\\_Upacara\\_Tulude](http://www.academia.edu/9145093/Transnifikansi_Kue_Tamo_dalam_Upacara_Tulude).
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019.
- Redaksi, n.d. “Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama dan Berkoordinat ke PBB” <http://www.big.go.id/berita-surta/show/indonesia-daftarkan-16-056-pulau-bernama-dan-berkoordinat-ke-pbb>. Diakses pada 20 Desember 2017.
- Redaksi. (2016). “*Tulude*, Manifestasi Daerah yang Berkepribadian Budaya”, 6 Februari. <http://www.seputarsulut.com/Tulude-manifestasi-daerah-yang-berkepribadian-budaya/>. Diakses pada 20 Desember 2017.
- Retnowati, Endang (ed). (2007). *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia: Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Industri Maju di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- Smyntyna, Olena. (2016). “Cultural Resilience Theory As An Instrument Of Modeling Human Response To Global Climate Change. A Case Study In The North-Western Black Sea Region On The Pleistocene-Holocene Boundary.” *RIPARIA* 2 (2016): 1–20.
- Soeratin, Aat (ed). (2011). *Tepian Tanah Air, 92 Pulau Terdepan Indonesia; Indonesia Bagian Tengah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sem Muhaling, (2012). “Upacara Adat *Tulude*”. 22 Februari. <http://budaya-indonesia.org/Upacara-Adat-Tulude>. Diakses pada 20 Desember 2017.
- Umi Qodarsasi, n.d. Upacara Adat *Tulude*, Kearifan Lokal Suku Sangir. <https://indonesiamengajar.org/cerita-pm/umi-qodarsasi-2/upacara-adat-Tulude-kearifan-lokal-suku-sangir>. Diakses pada September 2016.
- [www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/305](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/305). Diakses pada 22 Juli 2016.
- Wawancara Tim Perbatasan dengan SM. Guru SMA Marore. Marore. 1 Juni 2016
- Wawancara Tim Perbatasan dengan F. Petugas Kesehatan Puskesmas Marore. Marore. 28 Mei 2016
- Wawancara Tim Perbatasan dengan B. Petugas Keamanan Pulau Marore. Marore, 30 Juni 2016.

